

PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG

(Dalam Penyusunan Perencanaan Pembagunan Menengah Kampung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Pemerintah Kabupaten Nabire)

¹Petrus I. Suripatty, ² Ch. M. Lewerissa,
³Suryadi, ⁴ Estepanus L. S. Tumbal, ⁵ Ali Waromi

- ¹. Program Studi Adminitrasi Bisnis, Universitas SatyaWiyata Mandala
- ². Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas SatyaWiyata Mandala
- ³. Program Studi Teknik Informatika, Universitas SatyaWiyata Mandala
- ⁴. Program Studi Peternakan, Universitas SatyaWiyata Mandala
- ⁵. Program Studi Teknik Industri, Universitas SatyaWiyata Mandala

Email :

suripattyp@gmail.com¹, lewerissac@gamil.com²
suryadi.uswim@gmail.com³, estepanust1967@gmail.com, ⁴aliwaromi.uswim@gmail.com⁵

ABSTRAK

Kegiatan ini bertajuk “Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kampung Dalam Penyusunan Perencanaan Pembagunan Menengah Kampung Pemeritah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire”. Kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dan edukatif. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman perangkat kampung dalam mengelola data administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, dan administrasi pembangunan, di Kabupaten Nabire sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa aparatur Kampung di Kabupaten Nabire telah memahami dengan baik dan benar tentang administrasi pemerintahan kampung dan dapat mengisi ke dalam buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan.

Kata kunci: Penataan, Pengelolaan, Administrasi, Pemerintahan Kampung, Nabire

ABSTRACT

This activity is entitled "Development of Capacity Building for Village Government Apparatus in Preparing Village Medium Development Planning of the Nabire Regency Community and Village Empowerment Office". This activity uses participatory and educational methods. The purpose of this activity is to increase the understanding of village officials in managing general administrative data, population administration, financial administration, and development administration, in Nabire Regency in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 47 of 2016 concerning Village Government Administration in providing services to the community. The results of this activity show that the village officials in Nabire Regency have understood well and correctly about village government administration and can fill in the general administration book, population administration book, financial administration book, development administration book. Keywords: Structuring, Management, Administration, Village Government, Nabire

PENDAHULUAN

Istilah desa dalam konteks Papua disebut kampung (Yumame et al., 2020), karena memiliki peran yang sangat strategis pemerintah kemudian melahirkan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya regulasi tersebut memberikan ruang keleluasaan bagidesa dalam menjalankan "*local self government*" atau kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Septiani, 2021) dimana lembaga pemerintahan yang paling bawah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan pemerintahan desa

Kewenangan ini biasa juga disebut dengan istilah otonomi desa. Dalam rangka menjalankan otonomi desa yang efektif, maka tentunya memerlukan kapasitas dari aparatur desa yang memadai (Pemprov Jawa Timur, 2019). Dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan desa/kampung, dapat dilakukan melalui tertib administrasi. Aparaturdesa/Kampung memahami betul akan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan penyelenggaraan administrasidesa agar setiap program yang ada dapat dijalankan dengan baik (Lalenoh, 2018).

Akan tetapi, aparatur pemerintahan desa saat ini diperhadapkan pada persoalan keterbatasan kapasitas untuk menyusun tertib administrasi desa secara benar (Islami, 2016). Diketahui bahwa, administrasi pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya roda pemerintahan (Khumaidi, 2020). Secara sederhana administrasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan catat mencatat. Secara luas, administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu, merujuk Siagian, dalam Septiani (2021) administrasi dipahami sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berangkat dari definisi tersebut, maka dalam menjalankan pemerintahan kampung maka administrasi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tentunya selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Menurut Pilo et al. (2022) bahwa sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maka desa harus dibekali dengan tata kelola administrasi yang baik. Menurut Nurcholis administrasi desa atau kampung merupakan proses kegiatan pencatatan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang selanjutnya dicatat dalam buku administrasi desa/kampung (Septiani, 2021).

Tujuan dari dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa adalah terpenuhinya kebutuhan layanan public di tingkat desa, baik dalam pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Penyusunan rencana pembangunan desa memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintahan desa lembaga-lembaga yang ada ditingkat desa, serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang diinginkan. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Tugas pemerintah kampung dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung adalah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dengan melibatkan masyarakat kampung secara benar. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung juga harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat, data tersebut yaitu

berupa Profil Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Organisasi dan Tatalaksana pemerintahan desa, Keuangan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desadan pemberdayaan masyarakat. Hal ini nantinya dapat memudahkan pegawai kampung atau perencana desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan menetapkan prioritas pembangunan desa yang diusulkan untuk program pembangunan yang diinginkan.

METODE

Dalam melakukan suatu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) maka penting adanya metode yang digunakan. Metode ini menjadi suatu keniscayaan sebagai alat mencapai tujuan kegiatan sebagaimana yang direncanakan (Ilham et al., 2020). Olehnya itu, kegiatan ini menggunakan metode partisipatif dan edukatif. Partisipatif merupakan pelibatan aparatur kampung dari tahapan perencanaan, proses pelaksanaan, hingga pada tahap evaluasi setiap program kerja. Sedangkan edukatif merupakan upaya memasukkan unsur pendidikan pada pelaksanaan kegiatan (Yumame et al., dalam Ilham et al., 2021).

Penyusunan perencanaan pembangunan kampung jambai makmur kecamatan kandis kabupaten siak harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini nantinya dapat memudahkan petugas atau perencana desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan menetapkan prioritass pembangunan yang di usulkan untuk program pembangunan yang diinginkan. Selanjutnya, fasilitasi dilakukan dalam rangka pembuatan Penyusunan Perencanaan Pembagunan Menengah Kampung pemerintahan desa yang terdiri dari buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, buku administrasi keuangan dan buku administrasi pembangunan secara lengkap. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui materi pemahaman Penyusunan Perencanaan Pembagunan Menengah Kampung .



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi yang di sampaikan penulis dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung di kabupaten Nabire ini menggunakan teori Nurcholis (Aguswan 2018:13) yang terdapat 5 aspek indikator yaitu :

- a. Profil desa
- b. Organisasi dan tata kelola pemerintahan desa

- c. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Keuangan desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dari 5 aspek indikator kegiatan penyusunan merupakan serangkaian untuk memperoleh data dan informasi yang nantinya akan di jadikan bahan untuk melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Ketersediaan data dan informasi ini dapat mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan pada kampung di daerah Kabupaten Nabire. Data dan informasi yang lengkap dan akurat dapat memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa/Kampung yang di Musyawarahkan Pada Saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kampung (Musrenbang Desa)

Dari hasil kegiatan ini harapannya dilaksanakan oleh kampung di lingkup pemerintahan Kabupaten Nabire, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan kerjasama yang baik antara pemerintah desa yang ada serta adanya dukungan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang diinginkan.



Gambar 2. Peserta Kegiatan

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Profil desa

Profil desa merupakan gambaran umum desa yang menjelaskan kondisi desa secara keseluruhan. Di profil ini berisikan tentang data keluarga, potensi desa, dan data perkembangan desa. Keseluruhan data tersebut nantinya dapat dijadikan bahan dan masukan dalam musrenbang yang di lihat dari ketersediaan profil sebagai pendukung pembuatan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa

Organisasi dan tatalaksana desa merupakan kemampuan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Data ini nantinya juga dapat dijadikan bahan dan informasi untuk memperkuat penyusunan perencanaan pembangunan desa kemudian dapat dijadikan masukan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa. Ketersediaan data dan informasi organisasi dan tatalaksana desa mencakup pada aspek tatakelola manajemen desa sarana dan prasarana, SDM Aparatur. Dari data diatas dapat dijelaskan data dan informasi organisasi tatalaksana yang ada di kampung jambai makmur ini juga memiliki jenis organisasi desa yang berada diluar struktur organisasi formal pemerintahan desa yaitu LPM (Lembaga Pengembangan Masyarakat), Ibu-ibu PKK, BUMDES, ada UED (Unit Ekonomi Desa), dan Remaja Masjid. Keberadaan

organisasi ini nantinya dapat membantu pemerintah desa dalam mendukung rencana dan program pembangunan serta dapat memenuhi pelayanan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kegiatan organisasi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang sosial, dan bidang pemberdayaan kepada masyarakat. Keseluruhan bidang-bidang tersebut menggambarkan tugas dan fungsi pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan perangkatnya. Efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa harus di dukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut dengan administrasi desa. Administrasi desa yang lengkap sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Keuangan desa

Keuangan desa adalah segala sumber pendapatan desa yang dapat dikelola oleh pemerintahan desa dan dijadikan sumber daya kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), Alokasi Dana dan Desa (ADD), maupun bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Pemerintah desa wajib mengelolah keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan yang artinya terbuka; akuntabel artinya dipertanggung jawabkan; partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.



Gambar 3. Peserta dan Pemateri Kegiatan

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Nabire Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan kampung harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat di jadikan bahan masukan dalam kegiatan Musrenbang. Data dan informasi penyusunan perencanaan pembangunan kampung mencakup tentang profil desa, organisasi dan tatakelola pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi terkait tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire bersama aparaturnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Satya Wiyata Mandala, atas kesempatan yang diberikan dalam kegiatan pengabdian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasyid, M.H., Rofieq, A., & Supriyanto, H. (2021). Pelatihan Pengelolaan Administrasi Desa. *Devosi*, 2(1), 19-23.
- Afifudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Aguswan. 2018. *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya. Jakad Media Publishing.
- Eka, dkk (2022) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal JAPS*. 3 (1) 55-61.
- Ilham, I., Muttaqin, U. I., & Idris, U. (2020). Pengembangan Bumkam Berbasis Potensi Lokal Di Kawasan Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 104-109.
- Ilham, I., Renyaan, D., Sapioper, H. C., & Yumame, J. (2021). Edukasi Membudayakan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 12-23
- .Islami, Ulma. (2016). *Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung. Khumaidi,
- Nelli Fitri. 2020. "Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal". Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. *Community Development Journal* Vol.4, No.2 Juni 2023, Hal.1488-1493 P-ISSN 2721-4990 | E-ISSN 2721-50081493
- Lalenoh, Nina. (2018) Aparatur desa belum pahami administrasi pertanahan di Papua Barat . Diunduh di :<https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--aparatur-desa-belum-pahami-administrasi-pertanahan-di-papua-barat-tanggal-19-Maret-2023>
- Mouw, E., & Keradjaan, H. (2016). Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Studi Di Desa Wari Dan Wari Ino Kecamatan Tobelo. *Uniera*, 5(2), 19-25.
- Pemerintah Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun tentang Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Pemprov Jawa Timur. (2019). *Panduan Teknis Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Oleh Kecamatan. Biro Pemerintahan Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur*

-
- Pilo, R., Posumah, J.H., & Tulusan, F. (2022). Tata Kelola Administrasi Desa Tutumaloleo Kecamatan Galela Utara Kabupaten HalmaheraUtara. *Jurnal Administrasi Publik*, 121,(8), 56-41.
- Renyaan, D., & Sriyono, S. (2020). Penataan Administrasi Umum Di Kampung Yoboi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 307-311.
- Septiani, M. (2021). Pentingnya Tertib Administrasi Pada Pemerintahan Desa. Diunduh dari : <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pentingnya-tertib-administrasi-pada-pemerintahan-desa-Tanggal 19 Maret 2023>.
- Suryanti, M. S. D., Renyoet, C. C., Korwa, J. R., Gainau, A. W., Yumame, J., Ilham, I., ... & Idris, U. (2022). Edukasi Peduli Lingkungan Pada Pedagang Pasar Kaget Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 2158-2164.
- Yumame, J., Ilham, I., Renyaan, D., & Sapioper, H. (2020). MEMBANGUN KAMPUNG BERBASIS DATA (Pendampingan Penyusunan Monografi dan Profil Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246-253
- Yudith N.A. Karetji (2023) PENATAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KAMPUNG YAKONDE DISTRIK WAIBUKABUPATEN JAYAPURA. *Community Development Journal* Vol.4, No.2, Hal.1488-1493